Katalog: 9302020.8202

2013-2017

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN HALMAHERA TENGAH MENURUT PENGELUARAN

2013-2017

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

MENURUT PENGELUARAN

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN HALMAHERA TENGAH MENURUT PENGELUARAN 2013-2017

ISBN: 978-602-662110-8

Nomor Publikasi: 82020.1804

Katalog: 9302020.8202

Ukuran Buku: 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman: xii + 59 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Penyunting:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Desain Kover:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

Ilustrasi Kover:

Barang PMTB Halmahera Tengah (Kapal Nelayan)

Sumber Ilustrasi:

-

Diterbitkan oleh:

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Halmahera Tengah

TIM PENYUSUN

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2013-2017

Pengarah:

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Umum:

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

Penyunting:

Cahya Danu Rahman, SST

Penulis:

Faiszal Faqih Bachtiar, SST

Pengolah Data:

Faiszal Faqih Bachtiar, SST

Desain:

Cahya Danu Rahman, SST

KATA PENGANTAR

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2013-2017 merupakan publikasi yang menyajikan pembahasan mengenai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut pengeluaran atau permintaan akhir. Pengeluaran ini dirinci menjadi beberapa komponen, yaitu: Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori), Ekspor Luar Negeri, Impor Luar Negeri, dan Ekspor Neto Antar Daerah.

Kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan hingga terwujudnya publikasi ini.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Kami mengharapkan tanggapan dan saran untuk meningkatkan kualitas publikasi yang akan datang.

Weda, Juli 2018
Kepala BPS
Kabupaten Hamahera Tengah

Iwan Fajar Prasetyawan, SST, M.Si

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL

Halaman

DAFTAR GRAFIK

Halaman

PENJELASAN SIMBOL

Tanda-tanda, satuan-satuan, dan lain-lainnya yang digunakan dalam publikasi ini adalah sebagai berikut:

1. TANDA-TANDA

Data tidak tersedia	:	...
Tidak ada atau nol	:	–
Data dapat diabaikan	:	0
Tanda decimal	:	,
Data tidak dapat ditampilkan	:	NA
Angka perkiraan	:	e
Angka sementara	:	*
Angka sangat sementara	:	**
Angka diperbaiki	:	r

2. SATUAN

barel	:	158,99 liter = 1/6,2898 m3
hektar (ha)	:	10 000 m2
kilometer (km)	:	1 000 meter m)
knot	:	1,8523 km/jam
kuintal	:	100 kg
KWh	:	1 000 Watt hour
MWh	:	1 000 KWh
liter (untuk beras)	:	0,80 kg
ons	:	28,31 gram
ton	:	1 000 kg

Satuan lain: buah, dus, butir, helai/lembar, kaleng, batang, pulsa, ton kilometer (ton-km), jam, menit, persen (%).

Perbedaan angka di belakang koma disebabkan oleh pembulatan angka

BAB I PENDAHULUAN

1.1 PENGERTIAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) merupakan salah satu bentuk tampilan data ekonomi suatu wilayah, di samping bentuk tampilan lain seperti PDRB menurut lapangan usaha, Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi, dan Neraca Arus Dana. Di dalam sistem kerangka kerja (*frame work*) data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran merupakan ukuran dasar (*basic measure*) yang menggambarkan penggunaan atas barang dan jasa (*product*) yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam konteks ini, PDRB Pengeluaran itu menggambarkan hasil "akhir" dari proses produksi yang berlangsung dalam batas-batas teritori suatu wilayah. Berbagai jenis barang dan jasa akhir tersebut akan digunakan untuk memenuhi permintaan akhir oleh pelaku ekonomi domestik maupun pelaku ekonomi dari luar wilayah bahkan dari luar negeri. Beberapa agregat penting dapat diturunkan dari PDRB Pengeluaran ini seperti variabel Pengeluaran Konsumsi Akhir, pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik, serta ekspor dan impor.

Penghitungan PDRB melalui pendekatan pengeluaran (*expenditure*) tidak terlepas dari penghitungan PDRB melalui pendekatan lapangan usaha (*production*). Sungguhpun demikian, PDRB Pengeluaran diestimasi secara independen dengan menggunakan data dasar yang relatif berbeda. PDRB Produksi menggambarkan aktivitas produksi, serta pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang terlibat (balas jasa faktor produksi)[1]. Sedangkan PDRB Pengeluaran menggambarkan aktivitas pengeluaran yang dilakukan para pelaku ekonomi untuk mendapatkan barang dan jasa yang diproduksi tersebut. Melalui PDRB Pengeluaran juga dapat dilihat keterkaitannya dengan penyediaan barang dan jasa yang berasal dari domestik maupun dari impor. Melalui hubungan ini terlihat titik keseimbangan makro antara sisi penyediaan (*supply side)* dan sisi permintaan (*demand side)* barang dan jasa.

Secara konsep[2] penghitungan PDRB dari sisi yang berbeda di atas dimaksudkan untuk: i) memastikan konsistensi dan kelengkapan di dalam membuat estimasi; ii) memberi manfaat lebih di dalam melakukan analisis; dan iii) mengontrol kelayakan hasil estimasi. Secara teoritis, kedua pendekatan tersebut akan menghasilkan nilai yang sama besar (*equivalent*). Namun karena pendekatan estimasi dan metoda pengukuran yang digunakan berbeda, maka akan muncul selisih statistik (*statistical descrepancy*).

[1] *Termasuk di dalamnya penyusutan dan pajak tidak langsung "neto" (pajak tidak langsung dikurangi subsidi)*
[2] *Handbook of National Accounting. Accounting for Production: Sources and Methods (Series F no 30 United Nations)*

Dengan demikian PDRB Pengeluaran menjelaskan besarnya nilai barang dan jasa *(output)* yang dihasilkan dalam wilayah domestik, yang digunakan sebagai konsumsi "akhir" oleh masyarakat. Secara spesifik, yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan barang dan jasa yang tidak dimaksukan untuk diproses lebih lanjut (dikonsumsi habis). Penggunaan produk akhir tersebut diwujudkan dalam bentuk "permintaan akhir". Permintaan akhir yang dimaksud terdiri dari komponen-komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumahtangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori (PI), serta komponen Ekspor barang dan jasa.

Dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi permintaan akhir masyarakat tersebut, tidak terlepas dari ketergantungan pada produk yang berasal dari dari luar wilayah atau luar negeri (impor). Berbagai barang dan jasa yang menjadi konsumsi akhir masyarakat di dalamnya akan terkandung produk impor. Sehingga dalam mengukur besarnya nilai tambah domestik (PDRB), komponen impor barang dan jasa harus dikeluarkan atau dikurangkan dari penghitungan konsumsi atau permintaan akhir. Tingginya permintaan tidak selalu diimbangi oleh penyediaan domestik, sehingga kondisi ini menjadi peluang bagi masuknya produk impor. Data empiris menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu, perdagangan produk impor terus berkembang baik secara kuantitas, nilai, maupun ragamnya.

Secara konsep, PDRB Produksi (Y) sama besar dengan PDRB Pengeluaran (E), namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Selain berbeda dalam struktur atau komposisi, pendekatan pengukuran antar keduanya juga berbeda. Dalam penyajian data PDRB, perbedaan ini diletakkan pada sisi PDRB Pengeluaran. Unsur yang menyebabkan perbedaan tersebut antara lain adalah konsep dan basis pengukuran, metoda dan cakupan pengukuran, serta data dasar yang digunakan untuk estimasi. Melalui penjelasan ini para pengguna data PDRB tidak mempermasalahkan adanya perbedaan (*statistical descrepancy*) tersebut.

Penyusunan data **PDRB Pengeluaran** juga dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana "pendapatan" (Y) yang tercipta melalui proses produksi menjadi sumber pendapatan masyarakat[3], yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir.

3. - Yang dimaksud adalah rumahtangga, pemerintah, lembaga non profit yang melayani rumah tangga serta sektor produksi (produsen) di wilayah domestik
- Disebut sebagai pendekatan "riil"
- Siklus ekonomi secara umum yang menjelaskan tentang hubungan antara balas jasa faktor produksi (pendapatan) dengan pengeluaran atas penggunaan berbagai produk barang dan jasa oleh faktor produksi tersebut

Dari sudut pandang lain, PDRB Pengeluaran juga menjelaskan penggunaan dari sebagian besar produk domestik bruto untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir, atau dengan istilah yang berbeda disebut sebagai **"output akhir (*final output*)"**. Mengkaitkan antara pendapatan dan pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa dari produk domestik maupun impor (termasuk untuk diekspor) merupakan bentuk analisis yang sederhana dari data PDRB. Keharusan memiliki jumlah yang sama pada kedua model pendekatan PDRB tersebut, secara simultan dapat ditunjukkan melalui model atau persamaan *Keynesian* sbb :

$$\mathbf{Y = C + GFCF + \Delta\ Inventori + X - M}$$

Y (*Income*)	= PDRB Produksi
C (*Consumption*)	= Konsumsi akhir
GFCF (*Gross Fixed Capital Formation*)	= Pembentukan Modal Tetap Bruto
Δ Inventori	= Perubahan Inventori
X	= Ekspor
M	= Impor

Persamaan di atas menunjukkan pendapatan atau nilai tambah bruto dari hasil penghitungan PDRB Produksi akan "identik" dengan PDRB Pengeluaran. Jika Y adalah pendapatan, C adalah konsumsi akhir, dan GFCF serta Δ Inventori merupakan bentuk investasi fisik, maka selisih antara ekspor dengan impor menggambarkan surplus atau defisit dari aktivitas perdagangan barang dan jasa antar wilayah, baik dengan wilayah lain ataupun dengan luar negeri.

Melalui pendekatan ini dapat diketahui perilaku masyarakat dalam menggunakan pendapatan, apakah hanya untuk tujuan konsumsi (akhir) atau juga untuk tujuan investasi (fisik). Selain itu juga dapat diketahui besarnya ketergantungan ekonomi wilayah (domestik) terhadap luar negeri dalam bentuk perdagangan internasional (*external transaction*). Selisih antara ekspor dan impor juga disebut sebagai "ekspor neto".

Sebagaimana PDRB Produksi, dari PDRB Pengeluaran juga dapat diturunkan berbagai data agregat terntang perekonomian wilayah seperti nilai nominal, struktur atau distribusi pengeluaran konsumsi akhir, pertumbuhan "riil", serta indeks harga implisit. Data yang dimaksud tersedia baik untuk masing-masing komponen PDRB Pengeluaran maupun untuk total perekonomian.

1.2 PERUBAHAN TAHUN DASAR PDRB

Mengapa Tahun Dasar PDRB Perlu Diubah?

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada kondisi perekonomian global maupun lokal, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional, serta semakin meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan beberapa contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam mekanisme pencatatan data statistik nasional.

Satu bentuk implementasi dari *System of National Accounts* (*SNA*) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB/PDRB. Di Indonesia kegiatan perubahan tahun dasar dari tahun 2000 ke 2010 dilakukan bersamaan dengan upaya mengimplementasi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam buku panduan SNA 2008. Kegiatan ini diawali dengan menyusun kerangka kerja dalam bentuk *Supply and Use Tables* (SUT) Indonesia untuk tahun data 2010. Dari kerangka SUT tersebut diperoleh nilai estimasi PDB dan komponen-komponennya. Selanjutnya nilai PDB maupun komponennya ini dijadikan sebagai acuan (*benchmark*) ketika BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota menyusun PDRB-nya. Untuk itu, guna menjaga konsistensi dengan hasil penghitungan PDB, maka perubahan tahun dasar PDRB dilakukan secara simultan dengan perubahan tahun dasar PDB.

Apa yang Dimaksud dengan SNA 2008?

SNA 2008 merupakan rekomendasi internasional tentang tata cara pengukuran aktivitas ekonomi, yang telah sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, cakupan, dan klasifikasi, serta aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator ekonomi makro (*account*) seperti PDB/PDRB.

SNA dirancang guna menyediakan informasi tentang aktivitas yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi, utamanya aktivitas produksi, konsumsi, dan aktivitas akumulasi aset fisik. SNA dapat dimanfaatkan antara lain untuk kepentingan analisis, perencanaan dan penetapan kebijakan ekonomi. Melalui kerangka SNA, fenomena suatu perekonomi wilayah dapat dijelaskan dan dipahami dengan lebih baik.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB diantaranya adalah:

a. Menginformasikan kondisi ekonomi terkini, seperti terjadinya perubahan struktur dan pertumbuhan ekonomi;
b. Meningkatkan kualitas PDRB;
c. Menjadikan PDRB dapat diperbandingkan secara nasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Perubahan tahun dasar PDRB antara lain berdampak pada:

a. Meningkatkan nilai PDRB, yang pada gilirannya berpengaruh pada perubahan kelompok pendapatan (dari wilayah berpendapatan rendah menjadi menengah atau tinggi), serta pergeseran struktur ekonomi;
b. Perubahan besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan tabungan, neraca perdagangan, serta struktur dan pertumbuhan ekonomi;
c. Perubahan input data untuk keperluan *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Terpilihnya tahun 2010 sebagai tahun dasar didasarkan atas beberapa alasan sbb:

- Perekonomian Indonesia pada tahun 2010 relatif stabil;
- Terjadinya perubahan struktur ekonomi Indonesia selama 10 (sepuluh) tahun terakhir, terutama di bidang informasi, teknologi dan transportasi. Perubahan ini berpengaruh pada pola distribusi dan munculnya beberapa produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar, yang harus dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun[4];
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, sumber data, dan metodologi penghitungan sesuai rekomendasi SNA 2008;
- Tersedianya data dasar untuk meningkatkan kualitas PDRB seperti hasil Sensus Penduduk 2010 dan Indeks Harga Produsen (*Producers Price Index*);
- Tersedianya kerangka SUT Indonesia tahun 2010, yang menunjukkan keseimbangan antara produksi, konsumsi serta pendapatan yang tercipta dari aktivitas tersebut.

[4] *SNA1993, para 16.76: "constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing"*

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya, dan 44 diantaranya merupakan revisi yang utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDB/PDRB tahun dasar 2010 antara lain adalah:

- Konsep dan Cakupan

a. Sumber daya hayati (*cultivated biological resources*/*CBR*). *CBR* merupakan nilai aset alam hasil budidaya manusia, yang diperlakukan sebagai bagian dari output pertanian dan PMTB. Contoh nilai tegakan padi, kelapa sawit dan karet yang belum dipanen, serta nilai sapi perah yang belum menghasilkan.

b. Sistem persenjataan (*military weapon systems/MWS*). *MWS* merupakan nilai pengeluaran pemerintah untuk pengadaan alat pertahanan dan keamanan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri peralatan militer dan PMTB seperti pesawat tempur, kendaraan lapis baja, dan peluru kendali.

c. Penelitian dan pengembangan (*research and development*/*RnD*). *RnD* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB seperti *RnD* tentang varietas padi, produk otomotif, dan riset pemasaran.

d. Eksplorasi dan evaluasi mineral (*mineral exploration and evaluation/MEE*). *MEE* merupakan nilai pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah berhasil atau tidak menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

e. Bank Sentral (*Central Bank/CB*). Aktivitas Bank Indonesia yang terkait dengan penyediaan jasa kebijakan moneter dan pengawasan dipisahkan dari jasa intermediasi keuangan. Aktivitas tersebut digabungkan dengan aktivitas penyediaan jasa regulasi yang dihasilkan pemerintahan.

f. Komputer software (*computer software and databases*/*CSD*). *CSD* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunan *databases*, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

g. Produk kekayaan intelektual (*entertainment, literary or artistic originals/ELA*). *ELA* merupakan nilai pembelian atau biaya pembangunannya, yang diperlakukan sebagai bagian dari output industri yang melakukannya dan PMTB.

h. pengeluaran untuk aktivitas eksplorasi dan evaluasi barang tambang dan mineral, tanpa memperhitungkan apakah kegiatan tersebut berhasil ataupun tidak berhasil menemukan cadangan tambang atau mineral. Biaya eksplorasi dan evaluasi diperlakukan sebagai bagian dari output industri pertambangan dan PMTB.

- Metodologi

Output jasa intermediasi keuangan. Output industri ini diestimasi dengan metoda FISIM (*Financial intermediation services indirectly measured / FISIM*). *FISIM* dihitung berdasarkan tingkat suku bunga simpanan (*deposits*), bunga pinjaman (*loans*), dan suku bunga referensi (*reference*). Metoda ini menggantikan metoda *Imputed Bank Services Charge* (*IBSC*).

- Valuasi

Nilai tambah bruto lapangan usaha dinilai dengan harga dasar (*Basic Price*). Harga dasar merupakan harga keekonomian suatu barang atau jasa pada tingkat produsen, sebelum ada intervensi pemerintah dalam bentuk pajak dan subsidi atas produk.

- Klasifikasi

Klasifikasi yang digunakan adalah Internasional Standard Industrial Classification (ISIC rev.4) dan Central Product Classification (CPC rev.2). BPS mengadopsi kedua jenis klasifikasi tersebut menjadi KBLI 2009 dan KBKI 2010.

Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga 2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT 5. Perubahan Inventori
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
4. Perubahan Inventori	5. Perubahan Inventori
5. Ekspor	6. Ekspor
6. Impor	7. Impor

BAB II METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

2.1 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR RUMAHTANGGA (PK-RT)

i. Pendahuluan

Sektor rumahtangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan komponen konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran[5]. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen serta penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lainnya.

ii. Konsep dan Definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga untuk tujuan konsumsi. Rumahtangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumahtangga residen, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis barang dan jasa tersebut diklasifikasikan menurut *Classifications of Individual Consumption by Purpose (COICOP)*, sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

[5] *Untuk Kabupaten/Kota yang mempunyai hasil tambang/industri/perkebunan dan nilai ekspornya sangat tinggi, umumnya nilai konsumsi rumahtangganya relatif lebih rendah*

Namun dalam publikasi ini, PK-RT hanya diklasifikasi ke dalam 12 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perelngkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya
6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi komponen PK-RT bersumber dari :

- Survei Sosial Ekonomi Nasional/Daerah (Susenas/Suseda), BPS
- Survei Khusus Konsumsi Rumahtangga Triwulanan (SKKRT), BPS
- Sensus Penduduk 2010, BPS
- Data Sekunder (dari dalam maupun luar BPS)
- Indeks Harga Konsumen (IHK), BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-RT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi perkapita Susenas/Suseda (untuk PK-RT Tahunan)
2. Data poin 1 dikalikan dengan penduduk pertengahan tahun, dikalikan 12 (PKRT Tahunan)
3. Data poin 2 dikelompokan menjadi 12 kelompok COICOP, dengan beberapa komoditas dikontrol secara tersendiri;
4. Terhadap data poin 3, dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan data sekunder atau data/indikator suplai;
5. Diperoleh nilai PK-RT Tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku) ;
6. Susun Indeks implisit PK-RT berdasarkan IHK Kota (provinsi/kota terdekat);
7. Nilai PK-RT atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara membagi hasil poin 5 dengan poin 6.

Catatan:

Komponen PK-RT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan konsumsi rumahtangga triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SKKRT.

2.2 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR LEMBAGA NON PROFIT YANG MELAYANI RUMAHTANGGA (PK-LNPRT)

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumahtangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri di dalam perekonomian suatu wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggota maupun bagi kelompok rumahtangga tertentu secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga yang ditawarkan di bawah tingkat harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Untuk diketahui, sesuai dengan fungsinya LNP dapat dibedakan atas LNP yang melayani rumahtangga (LNPRT) dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggota atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota yang dimaksud bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, Organisasi sosial, Organisasi profesi, Perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/hobi, Lembaga swadaya masyarakat, Lembaga keagamaan, dan Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT merupakan nilai output non-pasar yang dihasilkan oleh LNPRT. Nilai output non-pasar diestimasi berdasarkan nilai pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasional. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis dan barang cetakan; pembayaran rekening listrik, air, telepon, teleks, faksimili; biaya rapat, seminar, perjamuan; biaya transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas; belanja barang dan jasa lainnya; sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
b. Kompensasi tenaga kerja, contoh: upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lain
c. Penyusutan
d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Sumber Data

a. Survei Khusus Lembaga Nonprofit yang melayani Rumahtangga (SK-LNP), BPS
b. SK-LNP Triwulanan (SK-LNPT), BPS
c. Hasil *up-dating* direktori LNPRT, BPS
d. Indeks Harga Konsumen, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-LNPRT Tahunan diestimasi dengan metoda sbb:

1. Nilai pengeluaran konsumsi per jenis lembaga dari hasil SK-LNP;
2. Hasil dari poin 1 dikalikan dengan banyaknya lembaga pada pertengahan tahun dari Direktori LNPRT;
3. Terhadap hasil poin 2 dilakukan kontrol/koreksi dengan menggunakan indikator kegiatan hasil SK-LNP seperti jumlah tenaga kerja, penerima layanan, berbagai even seperti munas, rakerda, dan penanganan bencana;
4. Diperoleh nilai PK-LNPRT tahunan atas dasar harga berlaku (atas dasar harga Berlaku);
5. Susun Indeks implisit PK-LNPRT berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat);
6. Nilai PK-LNPRT atas dasar harga Konstan (ADHK) diperoleh dengan membagi hasil poin 4 dengan poin 5.

Catatan :

Komponen PK-LNPRT Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi LNPRT triwulanan yang diperoleh dari hasil kegiatan SK-LNPT.

2.3 PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH (PK-P)

i. Pendahuluan

Unit pemerintah merupakan unit institusi yang terbentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang legislatif, yudikatif, dan eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas teritori suatu wilayah atau negara. Pemerintah juga berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi individu atau kelompok rumahtangga tertentu, pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lainnya, serta berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan melalui aktivitas transfer. Dari sudut pandang lain, unit pemerintah terlibat dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah berperan sebagai konsumen maupun produsen barang dan jasa, serta sebagai regulator yang menetapkan kebijakan di bidang fiskal maupun moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah melakukan aktivitas produksi dan investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Nilai PK-P merupakan besarnya nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah untuk dikonsumsi oleh pemerintah itu sendiri. Nilai tersebut diestimasi dengan pendekatan pengeluaran, yakni sebesar nilai pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran kompensasi pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, serta nilai output dari unit Bank Indonesia. Nilai ini masih harus dikurangi nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan melalui unit produksi yang tak terpisahkan dari aktivitas pemerintahan secara keseluruhan. Aktivitas yang dimaksud mencakup aktivitas:

1. Memproduksi barang yang sejenis dengan barang yang diproduksi unit perusahaan seperti publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, dan pembibitan tanaman di kebun percobaan. Aktivitas menghasilkan barang-barang semacam itu bersifat insidentil dan di luar fungsi utama dari unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa, seperti penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam parktek, pemerintah akan memungut biaya, namun umumnya biaya yang dikenakan tidak akan melebihi seluruh biaya yang dikeluarkan pemerintah. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non-komoditi atau pendapatan jasa.

iii. Cakupan

Sektor pemerintah terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, pemerintah kabupaten/kota mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

PK-P kabupaten/kota mencakup: a). PK-P desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah kabupaten/kota; b). PK-P kabupaten/kota yang bersangkutan; c). PK-P pusat yang merupakan bagian dari PK-P kabupaten/kota.

iv. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk mengestimasi PK-P kabupaten/kota tahunan adalah:

a. Data realisasi APBD Tahunan, Kementrian Keuangan dan Bappeda
b. Statistik Keuangan Daerah, BPS
c. Output Bank Indonesia, Bank Indonesia
d. Gaji Pegawai Negeri Sipil, Kementrian Keuangan dan Bappeda
e. Indeks Harga dan Indeks Upah, BPS
f. Indeks perkembangan pengeluaran pemerintah daerah triwulanan, BPS

v. Metoda Estimasi

Komponen PK-P kabupaten/kota Tahunan diestimasi dengan menggunakan metoda:

PK-P atas dasar harga Berlaku = Output – Penjualan barang dan jasa + *Social transfer in kind purchased market production* + Output Bank Indonesia

Output non pasar dihitung melalui pendekatan biaya operasional, seperti belanja pegawai, belanja barang, belanja bantuan sosial dan belanja lain-lain.

Catatan :

1. Komponen PK-P Triwulanan diestimasi dengan menggunakan indeks perkembangan pengeluaran konsumsi pemerintah daerah triwulanan
2. PK-P atas dasar harga Konstan diestimasi dengan men-*deflate* PK-P atas dasar harga Berlaku dengan menggunakaan deflator berikut:

Jenis Belanja	Deflator	Keterangan
Belanja Pegawai	Indeks Upah	Sama dengan Nasional
Belanja Barang	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penyusutan	Indeks Implisit PMTB	
Belanja Bansos	IHPB umum tanpa ekspor	Sama dengan Nasional
Penerimaan barang dan jasa	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Social Transfer in kind	IHK umum	Prov atau Kab/Kota terdekat
Output BI		Neraca Jasa

2.4 PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor penentu di dalam perkembangan atau pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam konteks PDRB, aktivitas investas yang dimaksud adalah investasi dalam bentuk fisik. Aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori (PI). Komponen PMTB terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya; mesin dan perlengkapan; kendaraan; tumbuhan dan ternak; serta barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan barang modal yang ada pada unit produksi dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri, serta barang modal baru maupun barang modal bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer dan barter), serta pertumbuhan aset sumberdaya hayati yang dibudidaya (*Cultivated Biological Resources*/CBR). Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, serta sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Dalam hal pengurangan barang modal yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta mengalami penyusutan sepanjang usia pakai-nya. Istilah “bruto” mengindikasikan bahwa di dalamnya mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal karena digunakan dalam proses produksi secara normal selama periode tertentu.

iii Cakupan

PMTB mencakup:

1. Penambahan dikurangi pengurangan barang modal baik baru maupun bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan dan konstruksi lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*);

2. Biaya alih kepemilikan atas aset non-finansial yang tidak diproduksi seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar barang modal, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakai-nya seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi.

iv Sumber Data

a. Output industri konstruksi, BPS
b. Nilai impor 2 digit HS, BPS
c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang, BPS
d. Laporan Keuangan Perusahaan, Data Sekunder dari luar BPS
e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS
f. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), BPS
g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Penggalian (migas dan non-migas), BPS
h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum, BPS
i. Publikasi Statistik Konstruksi, BPS
j. Data Eksplorasi Mineral, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral
k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan Kementerian Pertanian.

v Metoda estimasi

Komponen PMTB diestimasi dengan menggunakan metoda langsung ataupun metoda tidak langsung tergantung ketersediaan data di masing-masing daerah.

✓ Metoda Langsung:

PMTB atas dasar harga Berlaku (Domestik) = Barang Modal Domestik + TTM + Pajak atas Produk (PPN) + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Berlaku (Impor) = Barang Modal Impor + TTM +Bea Impor + Biaya Instalasi

PMTB atas dasar harga Konstan diperoleh dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga Berlaku dengan IHPB sbb:

$$PMTB_{ADHK} = \frac{PMTB_{ADHB}}{IHPB}$$

IHPB yang digunakan adalah IHPB Nasional (2010=100) sesuai jenis barang modal.

- ✓ Metoda Tidak Langsung:

  Pendekatan Supply:

  PMTB atas dasar harga Berlaku = Total Supply Barang x Rasio PMTB

  Pendekatan Ekstrapolasi:

  PMTB atas dasar harga Konstan (t) = PMTB atas dasar hargak (t-1) x Indeks Produksi (t)

2.5 PERUBAHAN INVENTORI (PI)

i Pendahuluan

Dalam suatu perekonomian, inventori atau persediaan merupakan salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk kelangsungan suatu proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal. Komponen tersebut menjadi bagian dari pembentukan modal bruto atau investasi fisik, yang terjadi di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Komponen inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong. Ketersediaan data tentang perubahan inventori pada suatu periode akuntansi menjadi penting guna memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang lainnya, yang mempunyai nilai ekonomi atau manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian tersebut adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress)*, serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh produsen.

Nilai perubahan inventori merupakan selisih antara nilai inventori di akhir periode dengan nilai inventori pada awal periode (akuntansi). Perubahan inventori menjelaskan perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (bertanda positif) ataupun pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan dari proses produksi sehingga perlu dicadangkan, baik dalam bentuk bahan baku ataupun bahan penolong. Faktor ketidakpastian yang disebabkan oleh pengaruh dari faktor eksternal juga menjadi pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih disebabkan oleh unsur spekulasi, dengan harapan agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Sedangkan bagi pemerintah, pencadangan komoditas yang strategis dimaksudkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan gula pasir perlu dicadangkan oleh pemerintah. Namun bagi rumahtangga, pengadaan inventori barang lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsi.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang sbb :

a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
b. Inventori menurut jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), mencakup semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
c. Barang jadi, mencakup barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;
d. Barang setengah jadi, yang mencakup barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai);
e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang untuk tujuan dijual;
f. Ternak untuk tujuan dipotong;
g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau digunakan sebagai bahan bakar atau ersediaan; serta
h. Persediaan pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi komponen perubahan inventori adalah :

1. Laporan keuangan perusahaan hasil kegiatan survei atau *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
2. Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD, Data Sekunder dari luar BPS
3. Data komoditas pertambangan, Statistik Pertambangan dan Penggalian BPS;
4. Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang, BPS;
5. Data komoditas perkebunan;
6. Indeks harga implisit PDRB industri terpilih;
7. Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih;
8. Data persediaan beras, Bulog; data semen, Asosiasi Semen Indonesia; data gula, Dewan Gula Indonesia ; dan data ternak, Ditjennak Kementan.

v Metoda Estimasi

Komponen Perubahan Inventori (PI) diestimasi dengan menggunakan metoda revaluasi atau metoda deflasi, tergantung jenis komoditasnya.

a. Metoda Revaluasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan pertambangan.

PI atas dasar harga Berlaku = Volume nventori (t) – Volume inventori (t-1)) x Harga per unit

PI atas dasar harga Konstan = PI atas dasar harga Berlaku / IHPB

b. Metoda Deflasi

Metoda ini digunakan untuk komoditas industri pengolahan dan komoditas lainnya.

PI atas dasar harga Konstan = Inventori (t) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t) - Inventori (t-1) atas dasar harga Berlaku/IHPB (t-1)

PI atas dasar harga Berlaku = PI atas dasar harga Konstan x IHPB rata-rata (t)

2.6 EKSPOR - IMPOR

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan. Ragam barang dan jasa yang diproduksi maupun disparitas harganya menjadi faktor utama munculnya aktivitas tersebut. Wilayah yang tidak dapat memenuhi kebutuhan-nya sendiri berusaha untuk mendatangkan dari luar wilayah atau bahkan dari luar negeri. Di sisi lain, wilayah yang memproduksi barang dan jasa melebihi kebutuhan domestik-nya, terdorong untuk memperluas pasar ke luar wilayah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas berbagai barang dan jasa semakin meningkat. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus dan distribusi barang dan jasa. Kondisi ini semakin mendorong aktivitas ekspor-impor dari dan ke suatu wilayah.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri).

iii Cakupan

Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah kabupaten/kota terdiri dari:

a. Ekspor ke luar provinsi/kabupaten/kota
b. Impor dari luar provinsi/kabupaten/kota.

Selisih antara ekspor dan impor didefinisikan sebagai Net Ekspor.

iv Sumber Data

Nilai ekspor-impor wilayah kabupaten/kota didasarkan pada penghitungan Net Ekspor. Namun sering kali untuk mengestimasinya tidak ada data yang sesuai dengan konsep dan definisi yang ditentukan. Kondisi inilah yang menyebabkan Net Ekspor kabupaten/kota diperlakukan sebagai item penyeimbang (*residual*), yakni perbedaan antara PDRB menurut pengeluaran dengan PDRB menurut lapangan usaha. Selanjutnya dilakukan pemisahan Net Ekspor menjadi ekspor dan impor dengan mengunakan metoda tidak langsung.

BAB III

TINJAUAN PEREKONOMIAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH MENURUT PDRB PENGELUARAN 2013 -2017

3.1 PERKEMBANGAN PDRB PENGELUARAN

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (*SNA*) yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.

Secara total, PDRB Kabupaten Halmahera Tengah ADHB (atas dasar harga berlaku) di tahun 2017 meningkat dari periode tahun sebelumnya yaitu sebesar 1.931,505 miliar rupiah dari sebelumnya 1.768,991 mliar rupiah. Jika dinilai atas dasar harga konstan (ADHK 2010=100), maka peningkatan ini jauh lebih besar, yakni dari 1.261,991 miliar Rupiah (2010=100) menjadi 1.337,278 miliar Rupiah (2010=100), atau meningkat sebesar 5,97%.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah periode 2013 - 2017 tetap tumbuh positif dalam tiga tahun terakhir, yakni sebesar 4,34%; 11,24%; dan 5,97%. Nilai pertumbuhan terakhir menunjukan perlambatan pertumbuhan ekonomi di Halmahera Tengah namun nilainya masih relatif tinggi karena diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan volume ekonomi tersebut tercermin baik dari sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). Dari sisi permintaan akhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah didominasi pertumbuhan dari tiga komponen yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga (PK-RT), Konsumsi Pemerintah dan Investasi Fisik/PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto).

Peningkatan PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 1 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2013 - 2017

Table 1. GRDP at current price by Expenditure, Halmahera Tengah Regency 2013-2017

(Miliar Rp/*Billion Rp)*

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption*	463.82	522.64	603.70	644.57	694.11
2. Konsumsi LNPRT/*NPISH Consumption*	17.16	20.05	23.25	23.88	25.25

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption*	418.84	471.74	560.53	617.13	636.32
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	503.90	561.84	698.65	736.11	836.02
5. Perubahan Inventori/*Changes of Inventory*	53.70	(23.70)	130.63	(21.06)	(104.40)
6. Ekspor/*Export*	449.77	661.44	679.92	1 087.37	2 310.47
7. Impor/*Import*	558.60	812.77	1 153.18	1 319.01	2 466.27
PDRB / *GRDP*	**1 348.60**	**1 401.24**	**1 543.50**	**1 768.99**	**1 931.51**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Komponen Konsumsi Rumah Tanggah tumbuh 7,69 % pada tahun 2017, naiknya persentase pertumbuhan Konsumsi Rumahtangga berasal dari peningkatan jenis barang konsumsi dan dari adanya kenaikan harga antar periode waktu (inflasi). Secara umum perkembangan perekonomian di Halmahera Tengah tumbuh berasal dari komponen ekspor yang sudah maju dengan stabil jika dibandingkan dengan periode tahun 2016.

Grafik 1. PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran,

Kabupaten Halmahera Tengah 2013 - 2017

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divaluasi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga).

PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Halmahera Tengah pada periode 2013-2017 dapat dilihat dari tabel 2 dan grafik 1 berikut ini:

Tabel 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2013 - 2017

Table 2. GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure, Halmahera Tengah Regency 2013-2017

(Miliar Rp/*Billion Rp*)

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption*	402.76	432.96	476.03	491.27	508.78
2. Konsumsi LNPRT/*NPISH Consumption*	14.04	15.64	17.05	17.32	17.71
3. Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption*	343.94	352.93	390.24	401.12	407.13
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	440.89	450.76	519.17	540.39	600.05
5. Perubahan Inventori/*Changes of Inventory*	(71.56)	(20.65)	129.61	(13.34)	(28.95)
6. Ekspor/*Export*	420.25	463.90	570.47	1 018.02	1 734.51
7. Impor/*Import*	442.00	608.33	968.13	1 192.79	1 901.96
PDRB / GRDP	**1 108.32**	**1 087.22**	**1 134.43**	**1 261.99**	**1 337.28**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Dari tabel 2, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Konstan di Kabupaten Halmahera Tengah meningkat, yakni sebesar 1.108,32 miliar Rupiah (2013); 1.087,22 miliar Rupiah (2014); 1.134,43 miliar Rupiah (2015); 1.261,99 miliar Rupiah (2016); dan 1.337,28 miliar Rupiah (2017). Sedangkan dari grafik 2, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Halmahera Tengah cenderung melambat, yakni dari 11,24 persen pada tahun 2016 menjadi 5,97 persen pada tahun 2017.

Grafik 2. PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,

Kabupaten Halmahera Tengah 2013 - 2017
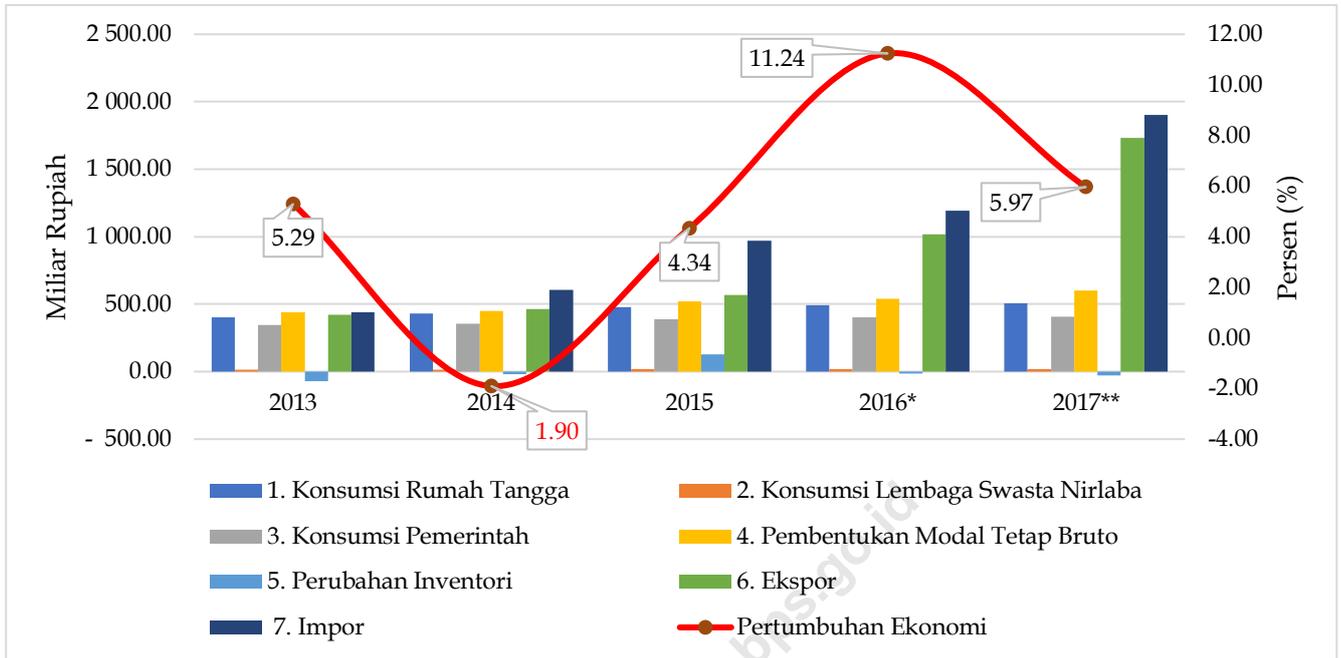
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Mulai dari tahun 2015 samapi 2017 perkembangan nilai ekspor dan impor di Halmahera Tengah terlihat tumbuh positif dengan baik. Ekspor selalu diimbangi dengan nilai impor yang lebih tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang baik dengan adanya pengelolaan secara efektif efisien oleh pemertintah maupun berbagai *stakeholder* terkait dalam menangani kekayaan alam berupa mineral yang ada di Halmahera Tengah.

Grafik 3. Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017

Figure 1. Comparing of GRDP at current price and GRDP at Constant Price 2010, Halmehara Tengah Regency 2013-2017
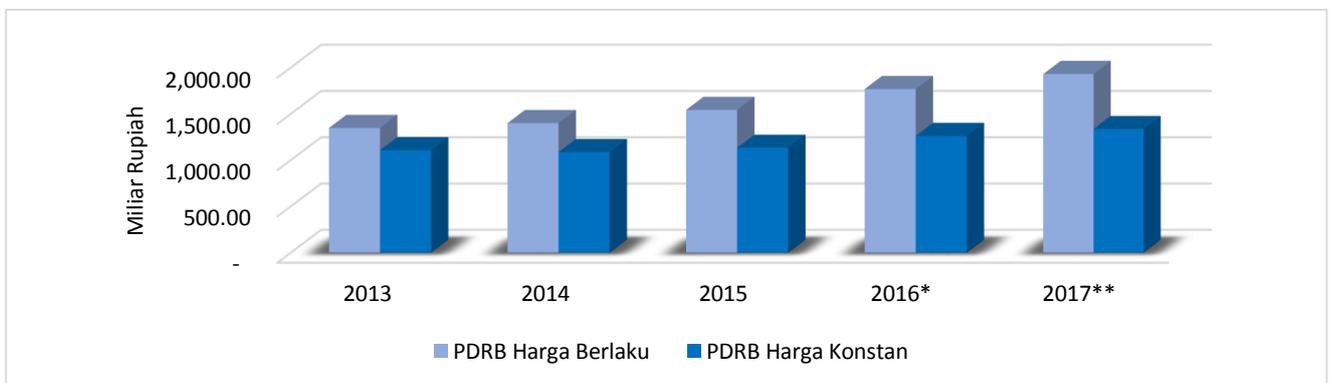
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Dari grafik 3, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Tabel 3. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2013- 2017

Table 3. Distribution of GRDP at Current Price by Expenditure, Halmahera Tengah Regency 2010-2015

(%)

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption*	34,39	37,30	39,11	36,44	35,94
2. Konsumsi LNPRT/*NPISH Consumption*	1,27	1,43	1,51	1,35	1,31
3. Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption*	31,06	33,67	36,32	34,89	32,94
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	37,36	40,10	45,26	41,61	43,28
5. Perubahan Inventori/*Changes of Inventory*	3,98	(1,69)	8,46	(1,19)	(5,41)
6. Ekspor/*Export*	33,35	47,20	44,05	61,47	119,62
7. Impor/*Import*	41,42	58,00	74,71	74,56	127,69
PDRB / *GRDP*	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak trelepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah tangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Dari tabel 3 terlihat bahwa selama periode 2013-2017, PDRB Kabupaten Halmahera Tengah, sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumahtangga (PK-RT). Pengeluaran untuk akitvitas pembentukan modal (PMTB) juga mepunyai kontribusi yang relatif besar, yakni sekitar 30 s.d 40 persen. Komponen net ekspor selama tiga tahun terakhir mengalami pertumbuhan yang artinya sebagian besar kebutuhan domestik mulai diimbangi produksi barangdan jasa yang berasal dari daerah Halmahera Tengah. Komponen ekspor pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang signifikan jika dilihat dari periode tahun sebelumnya yaitu tumbuh hampir dua kali lipat karena dicabutnya aturan mengenai pelarangan ekspor barang mineral mentah ke luar negeri.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017 (Permen ESDM 5/2017), dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017 (Permen ESDM 6/2017).

Grafik 4. Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2013 - 2017
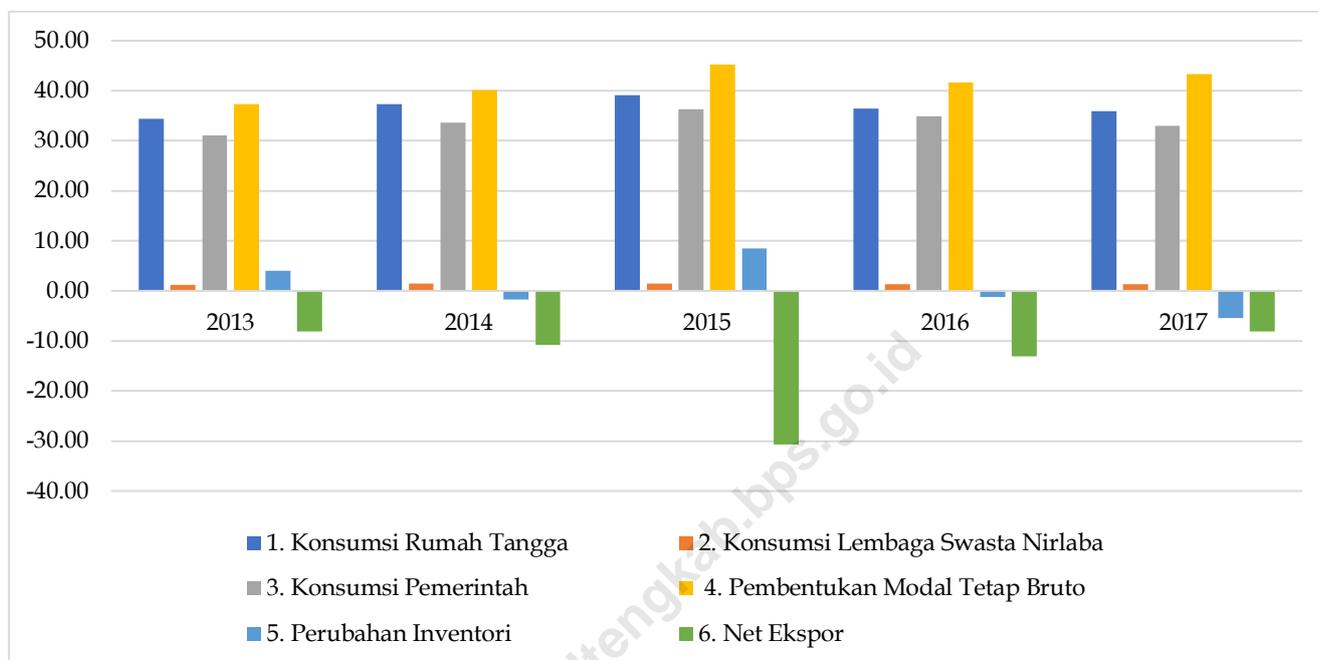
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Kontribusi komponen konsumsi pemerintah (PK-P) berada pada rentang 30 – 35 persen. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB cukup proporsional. Di sisi lain, pada tahun 2013-2017 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor (Net Ekspor), menunjukkan ekspor yang cenderung lebih rendah dari impor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi "defisit".

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 4, selama periode tahun 2013 - 2017 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah mengalami perkembangan yang fluktuatif, yakni sebesar 5,29 persen (2013); minus 1,9 persen (2014); 4,34 persen (2015); 11,24 persen (2016) dan 5,97 persen (2017). Sedangkan dari grafik 5 akan terlihat pertumbuhan masing-masing komponen PDRB selama periode tahun yang sama

Tabel 4. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2013 - 2017

Table 4. Growth rate of GRDP at 2010 Constant Price by Expenditure Halmahera Tengah Regency 2013-2017

(%)

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	***2013***	***2014***	***2015***	***2016****	***2017*****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption*	3,51	7,50	9,95	3,20	3,56
2. Konsumsi LNPRT/*NPISH Consumption*	10,10	11,42	9,00	1,55	2,29
3. Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption*	7,66	2,61	10,57	2,79	1,50
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	5,80	2,24	15,17	4,09	11,04
5. Ekspor/*Export*	(47,99)	10,39	22,97	78,45	70,38
6. Impor/*Import*	(53,34)	37,63	59,15	23,21	59,45
PDRB / *GRDP*	**5,29**	**(1,90)**	**4,34**	**11,24**	**5,97**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Indeks implisit[6] PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumahtangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2013 – 2017, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 5. Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2013 - 2017

Table 5. Implicit Indices of GRDP by Expenditure, Halmahera Tengah Regency 2013-2017

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	***2013***	***2014***	***2015***	***2016****	***2017*****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption*	115,16	120,71	126,82	131,20	136,43
2. Konsumsi LNPRT/*NPISH Consumption*	122,21	128,16	136,36	137,93	142,57
3. Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption*	121,78	133,66	143,64	153,85	156,29
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	114,29	124,64	134,57	136,22	139,33
5. Perubahan Inventori/*Changes of Inventory*	(75,05)	114,76	100,79	157,92	360,63
6. Ekspor/*Export*	107,03	142,58	119,19	106,81	133,21
7. Impor/*Import*	126,38	133,61	119,11	110,58	129,67
PDRB / *GRDP*	**121,68**	**128,88**	**136,06**	**140,17**	**144,44**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

[6] *Indeks perkembangan*

Tabel 6. Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017

Table 6. Source of Growth of GRDP by Expenditure Halmahera Tengah Regency 2013-2017

(%)

Komponen Pengeluaran/*Expenditure item*	***2013***	***2014***	***2015***	***2016****	***2017*****
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption*	1,30	(2,73)	3,96	1,34	1,39
2. Konsumsi LNPRT/*NPISH Consumption*	0,12	(0,14)	0,13	0,02	0,03
3. Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption*	2,33	(0,81)	3,43	0,96	0,48
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/*Gross Fixed Capital Formation*	2,30	(0,89)	6,29	1,87	4,73
5. Perubahan Inventori/*Changes of Inventory*	(11,92)	(4,59)	13,82	(12,60)	(1,24)
6. Ekspor/*Export*	(36,83)	(3,94)	9,80	39,45	56,77
7. Impor/*Import*	(48,00)	(15,01)	33,09	19,80	56,19
PDRB / *GRDP*	**5,29**	**1,90**	**4,34**	**11,24**	**5,97**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

3.2 PERKEMBANGAN KOMPONEN PDRB PENGELUARAN

Perubahan struktur perekonomian suatu wilayah sebagai akibat dari upaya pembangunan ekonomi yang dilaksanakan pada periode tertentu, tidak terlepas dari perilaku masing-masing komponen pengguna akhir. Setiap komponen mempunyai perilaku yang berbeda sesuai dengan tujuan akhir penggunaan barang dan jasa. Data empiris menunjukan bahwa sebagian besar produk atau barang dan jasa yang tersedia pada periode tertentu digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir oleh rumahtangga, LNPRT dan pemerintah, sebagian lagi digunakan untuk investasi fisik dalam bentuk PMTB dan perubahan inventori. Berikut perilaku masing-masing komponen PDRB pengeluaran Kabupaten Halmahera Tengah untuk periode 2013 – 2017.

3.2.1. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT) merupakan pengeluaran terbesar atas berbagai barang dan jasa yang tersedia. Data berikut menunjukkan bahwa dari seluruh nilai tambah bruto (PDRB) yang diciptakan di Kabupaten Halmahera Tengah, ternyata sebagian besar masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumahtangga. Dengan kata lain, sebagian besar produk (domestik) yang dihasilkan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah maupun produk (impor) yang didatangkan dari luar wilayah atau luar negeri akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir oleh rumahtangga.

Dalam suatu perekonomian, fungsi utama dari institusi rumahtangga adalah sebagai konsumen akhir (*final consumer*) atas barang dan jasa yang tersedia, termasuk konsumsi oleh rumahtangga khusus (seperti penjara, asrama dan lain-lain). Selanjutnya, berbagai jenis barang dan jasa yang dikonsumsi tersebut akan diklasifikasikan menurut 7 (tujuh) kelompok COICOP (*Classification of Individual Consumption by Purpose*), yaitu kelompok makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; angkutan dan komunikasi; restoran dan hotel; serta kelompok barang dan jasa lainnya.

Data berikut menunjukkan bahwa pada periode tahun 2013 – 2017 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami perubahan yang berfluktuatif, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Pada gilirannya kenaikkan tersebut juga akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Tabel 7. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017

Table 7. Trend of Using on Final Household Consumption of Halmahera Tengah Regency 2013—2017

U r a i a n	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/*Total of Household Consumption* a. ADHB / *Currrent Prices* (Juta Rp/*Million Rp)*	463 823,94	522 639,25	603 695,92	644 569,74	694 114,79
b. ADHK 2010/*2010 Constant Prices* (Miliar Rp/*Billion Rp)*	402 757,87	432 963,20	476 030,15	491 274,60	508 781,47
Proporsi terhadap PDRB/*Proportion to GRDP* **(% ADHB / *Currrent Prices)***	**34,39**	**37,30**	**39,11**	**36,44**	**35,94**
Rata-rata konsumsi per-Kapita/ *Average of per-capita consumtion* (Juta Rp/*Million Rp)* a. ADHB / *Currrent Prices* (Miliar Rp/*Trillion Rp)*	9,85	10,80	12,12	12,56	13,14
b. ADHK 2010/*2010 Constant Prices* (Miliar Rp/*Trillion Rp)*	8,55	8,94	9,56	9,57	9,63
Pertumbuhan/*Growth*[7] a. Total konsumsi RT/ *Total of Household Consumption* b. Perkapita/*Per capita*	3,51	7,50	9,95	3,20	3,56
Jumlah penduduk/*Number of population (000* orang/*person)*	47 079	48 414	49 807	51 315	52 813

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Selama periode 2013 – 2017 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB cenderung berfluktuasi, yaitu 34,39 persen (2013); 37,30 persen (2014); 39,11 persen (2015); 36,44 persen (2016); dan 35,94 persen (2017). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 39,11 persen kemudian kembali melambat namun tetap pada kisaran 30-36 persen.

Di sisi lain, kenaikan rata-rata konsumsi per-kapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pertumbuhan rata-rata konsumsi per-kapita menunjukan peningkatan, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Kondisi ini menunjukan rata-rata konsumsi setiap penduduk meningkat, baik secara kuantitas *(volume)* maupun secara nilai (termasuk peningkatan kualitas). Rata-rata konsumsi per-kapita secara "riil" meningkat pada kisaran 8,55 s.d 9,63 persen. Peningkatan tersebut tentu berpengaruh pada struktur konsumsi rumahtangga, seperti terlihat pada tabel berikut:

[7] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)*

Tabel 8. Struktur Komponen Konsumsi Rumahtangga Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017

***Table 8. Structure of Household Final Consumption Expenditure, Halmahera Tengah Regency* 2013—2017**[8]

(%)

Kelompok Konsumsi/*Consumption group*	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ *Food, beverages, and tobacco*	51,8	50,6	51,5	51,9	52,5
b. Pakaian dan Alas Kaki/ *Clothing and footwear*	2,7	2,7	2,7	2,8	2,9
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ *Housing, household equipment and routine household maintenance*	5,6	5,7	5,6	5,9	6,1
d. Kesehatan & Pendidikan/ *Health and education*	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ *Transport, Communication, Recreation and culture*	32,2	32,6	31,3	30,3	29,4
f. Hotel & Restoran/ *Hotels, and restaurants*	2,1	2,1	2,0	2,1	2,2
g. Lainnya/ *Miscellaneous goods and services*	4,1	4,8	5,3	5,4	5,3
Total Konsumsi /*Total of consumption*	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Selama periode 2013-2017, secara keseluruhan, masyarakat atau rumah tangga cenderung menghabiskan pengeluaran konsumsinya untuk keperluan makanan, minuman, dan rokok dengan kontribusinya terhadap total pegeluaran di kisaran 50 s.d 53 persen. Kemudian pengeluaran terbesar berikutnya adalah pengeluaran untuk transportasi, komunikasi, rekreasi, dan budaya.

Sementara itu, tingkat perubahan harga yang secara implisit disajikan dalam Tabel 9, menunjukkan peningkatan setiap tahun-nya untuk masing-masing kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan harga untuk komponen konsumsi Rumah tangga relatif tinggi. Selama periode 2013-2017 peningkatan harga tertinggi terjadi pada harga kelompok perumahan, perkakas dan perlengkapan, penyelenggaraan rumah tangga yaitu 5 hingga 10 persen.

[8] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)*

Tabel 9. Pertumbuhan Implisit (Indeks Harga) Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017
***Table 9. Implicit Growth (Price Indices) of Household Final Consumption Expenditure, Halmahera Tengah Regency* 2013—2017**[9]

(%)

Kelompok Konsumsi/*Consumption group*	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Makanan, Minuman, dan Rokok/ *Food, beverages, and tobacco*	3,2	4,5	5,2	4,5	5,7
b. Pakaian dan Alas Kaki/ *Clothing and footwear*	7,1	3,6	4,3	6,7	2,5
c. Perumahan, Perkakas, Perlengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga/ *Housing, household equipment and routine household maintenance*	9,8	8,1	6,8	5,9	3,4
d. Kesehatan & Pendidikan/ *Health and education*	4,7	6,3	5,7	6,9	5,0
e. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya/ *Transport, Communication, Recreation and culture*	9,7	3,6	3,8	0,5	1,2
f. Hotel & Restoran/ *Hotels, and restaurants*	7,6	6,6	2,6	5,5	6,2
g. Lainnya/ *Miscellaneous goods and services*	6,8	11,3	12,8	4,1	1,7
Total Konsumsi Rumah Tangga /*Total of Household consumption*	***6,0***	***4,8***	***5,1***	***3,5***	***3,9***

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

3.2.2. Konsumsi Akhir LNPRT

Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) adalah salah satu unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Dalam kegiatannya, LNPRT merupakan mitra pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan lingkungan hidup.

Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) turut berkontribusi dalam pembangunan perekonomian di Halmahera Tengah dari periode 2013-2017. Bahkan besarnya kontribusi terhadap PDRB Halmahera Tengah terus meningkat seiring bertambahnya periode waktu.

[9] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)*

Tabel 10. Perkembangan Pengeluaran Akhir Konsumsi LNPRT Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017
***Table 10. Trend of NPISH Final Consumption Expenditure, Halmahera Tengah Regency* 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi LNPRT					
a. ADHB *(Juta Rp)*	17 160,17	20 049,62	23 251,99	23 884,61	25 254,20
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	14 041,20	15 644,75	17 052,24	17 316,56	17 713,08
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	1,27	1,43	1,51	1,35	1,31
Pertumbuhan *(ADHK 2010)*	**10,10**	**11,42**	**9,00**	**1,55**	**2,29**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Total pengeluaran konsumsi LNPRT dalam kurun waktu tahun 2013-2017 mengalami peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan, meskipun di dua tahun terakhir 2016 dan 2017 terjadi perlambatan pertumbuhan konsumsi LNPRT. Secara umum pada tahun 2013-2015, rata-rata tiap tahunnya meningkat 8 hingga 12 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2014 karena adanya momen kampanye dan pemilihan presiden dan wakil presiden serta kampanye dan pemilihan anggota legislatif Kabupaten Halmahera Tengah. Meskipun melambat pada tahun 2016, konsumsi pengeluaran LNPRT kembali meningkat lagi menyesuaikan kondisi yang stabil di Halmahera Tengah usai tahun politik. Gambaran umum mengenai pengeluaran LNPRT antara lain selain Lembaga politik seperti ormas, juga Lembaga non Profit seperti Yayasan dan Kegiatan Masyarakat Umum.

3.2.3. Konsumsi Akhir Pemerintah

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) *Scarcity*, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah. b)

Excludable consumption, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga). c) *Rivalrous competition*, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri.

Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) *Non rivalry*, yaitu pengeluaran satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut. b) *Non excludable*, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.

Tabel 11. Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah Kabupaten Halmehera Tengah 2013-2017
***Table 11. Trend of Government Final Consumption Expenditure, Halmahera Tengah Regency* 2013 - 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Pemerintah					
a. ADHB *(Juta Rp)*	418 841,65	471 737,36	560 528,70	617 133,65	636 315,30
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	343 936,15	352 927,80	390 236,31	401 124,32	407 133,70
Proporsi terhadap PDRB *(% ADHB)*	31,06	33,67	36,32	34,89	32,94
Pertumbuhan *(ADHK 2010)*	**7,66**	**2,61**	**10,57**	**2,79**	**1,50**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Selama periode 2013-2017, pengeluaran konsumsi pemerintah memberikan porsi yang cukup besar bagi perekonomian Kabupaten Halmahera Tengah dengan di tiga puluh persen dari total PDRB Kabupaten Halmahera Tengah. Salah satu fungsi pemerintah adalah memberikan jasa layanan pada publik atau masyarakat dalam bentuk jasa kolektif maupun individual. Dalam praktek, pengeluaran pemerintah ini selalu dikaitkan dengan luasnya cakupan layanan yang diberikan pada masyarakat

(publik), meskipun tidak seluruh masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. Kondisi tersebut dapat diartikan bahwa setiap rupiah pengeluaran pemerintah harus ditujukan untuk melayani penduduk, baik langsung maupun tidak langsung. Pengeluaran konsumsi pemerintah secara total mengalami peningkatan namun jika dilihat dari pertumbuhannya yang di nilai atas dasar harga konstan, terjadi kontraksi atau perlambatan pertumbuhan yang dapat diartikan bahwa proporsi pengeluaran untuk pemerintah lebih dapat dikendalikan dan dapat dialokasikan untuk pengeluaran yang bersifat pembangunan secara inklusif.

Grafik 5. Proporsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB dan Pertumbuhannya secara ADHK Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2013-2017
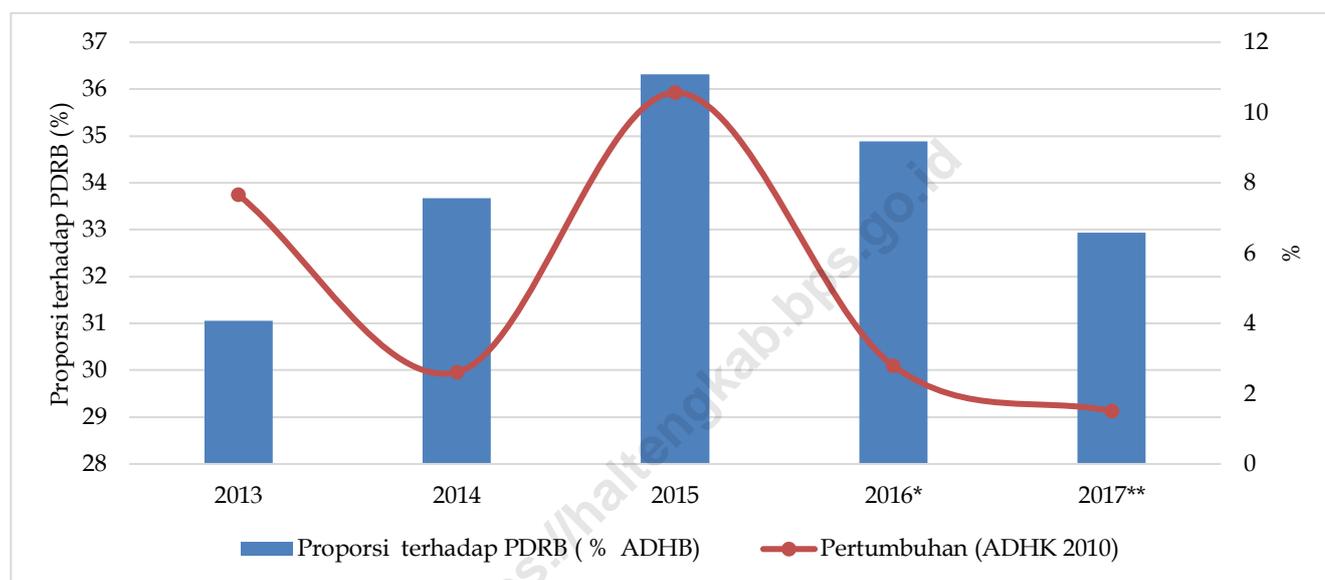
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

3.2.4. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) pada sajian PDRB menurut pengeluaran, lebih menjelaskan tentang bagian dari pendapatan (*income*) yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Atau pada sisi yang berbeda dapat pula diartikan sebagai gambaran dari berbagai produk barang dan jasa yang sebagian digunakan sebagai investasi fisik (kapital)[10]. Fungsi kapital adalah sebagai input tidak langsung (*indirect input*) di dalam proses produksi pada berbagai lapangan usaha. Kapital ini dapat berasal dari produksi domestik maupun dari impor.

Pengelompokan PMTB pada PDRB tahun dasar 2010 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Bangunan dan Non Bangunan. Data di bawah ini menjelaskan bahwa, secara keseluruhan

[10] *Selain bagian lain yang menjadi konsumsi antara, konsumsi akhir, ataupun diekspor*

pertumbuhan PMTB dalam kurun waktu 2013 – 2017 berfluktuasi. Terlihat pada tahun 2017 pengeluaran akhir yang sifatnya untuk investasi fisik cenderung meningkat secara signifikan. Hal ini karena mulai banyaknya pembangunan baik jalan maupun bangunan di Halmahera pada tahun tersebut. Pembangunan yang tepat dan efisien dalam infrastruktur dapat menopang kegiatan perekonomian di Halmahera Tengah lebih baik.

Tabel 12. Perkembangan dan Struktur PMTB
Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017
Table 12. Trend and Structure of GFCF, Halmahera Tengah Regency
2013 – 2017

U r a i a n	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total PMTB a. ADHB *(Juta Rp)*	503 903,97	561 843,83	698 649,92	736 109,86	836 024,67
b. ADHK 2010*(Juta Rp)*	440 888,34	450 764,56	519 166,78	540 387,65	600 048,12
Proporsi terhadap PDRB *(% - ADHB)*	**37,36**	**40,10**	**45,26**	**41,61**	**43,28**
Struktur PMTB [11] *a.* Bangunan (*Juta Rp*)	253 245,09	274 518,69	318 269,59	342 692,91	389 976,48
b. Non Bangunan *Juta Rp*)	250 658,88	287 325,14	380 380,33	393 416,96	446 048,18
Pertumbuhan[12] (%) a. Bangunan	3,78	1,03	7,64	2,07	13,06
b. Non Bangunan Total PMTB	7,71	3,35	21,92	1,85	9,37
Total PMTB	**5,80**	**2,24**	**15,17**	**1,95**	**11,04**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Bukti fisik secara langsung yang dapat diamati dari perkembangan PMTB atau sering disebut sebagai investasi fisik adalah mulai adanya pembangunan Rumah Susun di Halmahera Tengah pada tahun 2017. Selain itu juga tumbuh menjamur pembangunan perumahan milik warga dan kos-kosan.

3.2.5. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **"persediaan"** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

[11] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB)*
[12] *Diturunkan dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010)*

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen net ekspor antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Tabel 13. Perkembangan dan Struktur Perubahan Inventori Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017
***Table 13. Trend and Structure of Changes in Inventories, Halmahera Tengah Regency* 2013—2017**

U r a i a n	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Inventori a. ADHB *(Juta Rp)*	53 700,92	(23 700,79)	130 631,71	(21 063,04)	(104 398,37)
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	(71 555,28)	(20 651,59)	129 608,83	(13 337,78)	(28 948,96)
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	**3,98**	**(1,69)**	**8,46**	**(1,19)**	**(5,41)**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih jauh sebagaimana dilakukan pada pada komponen pengeluaran lainnya.

Pada tahun 2013 perubahan inventori atas dasar harga berlaku sebesar 53.700,92 juta rupiah, yang kemudian menurun pada tahun 2014. Nilai negatif tercatat pada tahun 2016 dan 2017 masing-masing sebesar negatif 21.063,04 juta rupiah dan negatif 104.398,37 juta rupiah. Tanda negaif pada dua tahun terakhir mengindikasikan adanya pengurangan persediaan barang (inventori).

Sementara itu, proporsi perubahan inventori terhadap total PDRB di Kabupaten Halmahera Tengah berfluktuasi antar periode. Tercatat, proporsi perubahan inventori hanya bernilai positif pada

tahun 2013 dan 2015 yaitu 3,98 persen dan 8,46, selanjutnya pada 2014, 2016 dan 2017 bernilai negatif yaitu -1,69 persen, -1,19 persen dan -5,41 persen. Umumnya perubahan inventori berkontribusi kecil terhadap total PDRB suatu daerah, namun nilai dan keberadaannya juga perlu menjadi perhatian karena nilai positif maupun negatif dapat menggambarkan kondisi persediaan barang dan bahan di daerah tersebut.

3.2.6. Ekspor Barang dan Jasa

Dalam struktur permintaan akhir, transaksi ekspor menggambarkan berbagai produk barang dan jasa yang tidak dikonsumsi di wilayah ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah, tetapi dikonsumsi oleh pihak yang berdomisili di wilayah lain, baik itu kabupaten lain di dalam satu propinsi, propinsi lain, maupun luar negeri, baik secara langsung maupun tidak langsung. Termasuk pula dalam ekspor pembelian oleh badan-badan internasional, kedutaan besar (termasuk konsulat), awak kapal (udara maupun laut) yang singgah dan sebagainya.

Tabel 14. Perkembangan Ekspor
Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017
Table 14. Trend of Export, Halmahera Tengah Regency
2013—2017

U r a i a n	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Ekspor a. ADHB *(Juta Rp)*	449 774,95	661 439,46	679 920,29	1 087 371,57	2 310 467,00
b. ADHK 2010 *(Juta Rp)*	420 251,03	463 901,16	570 467,57	1 018 020,28	1 734 506,01
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	**33,35**	**47,20**	**44,05**	**61,47**	**119,62**
Pertumbuhan[13]	(47,99)	10,39	22,97	78,45	70,38

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Secara total, dalam kurun waktu 2013-2017 nilai ekspor barang dan jasa menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2013 nilai ekspor barang dan jasa sebesar 449.774,95 juta rupiah meningkat signifikan hingga mencapai 2.310 467,00 juta rupiha pada tahun 2017. Sejalan dengan nilai ekspor atas dasar harga Berlaku, nilai ekspor barang dan jasa atas dasar

[13] *Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010*

harga konstan 2010 juga menunjukan arah pertumbuhan yang sama, yaitu cenderung meningkat. Sementara itu, pada periode 2013 s.d 2017, proporsi dalam PDRB bergerak sejalan yaitu cenderung meningkat dari 33,35 persen pada tahun 2013 menjadi 119,62 persen di tahun 2017. Namun besarnya proporsi ekspor harus dicermati bersama dengan data impor yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

Grafik 6. Pertumbuhan Komponen Ekspor atas dasar harga Berlaku PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Halmahera Tengah 2013 - 2017
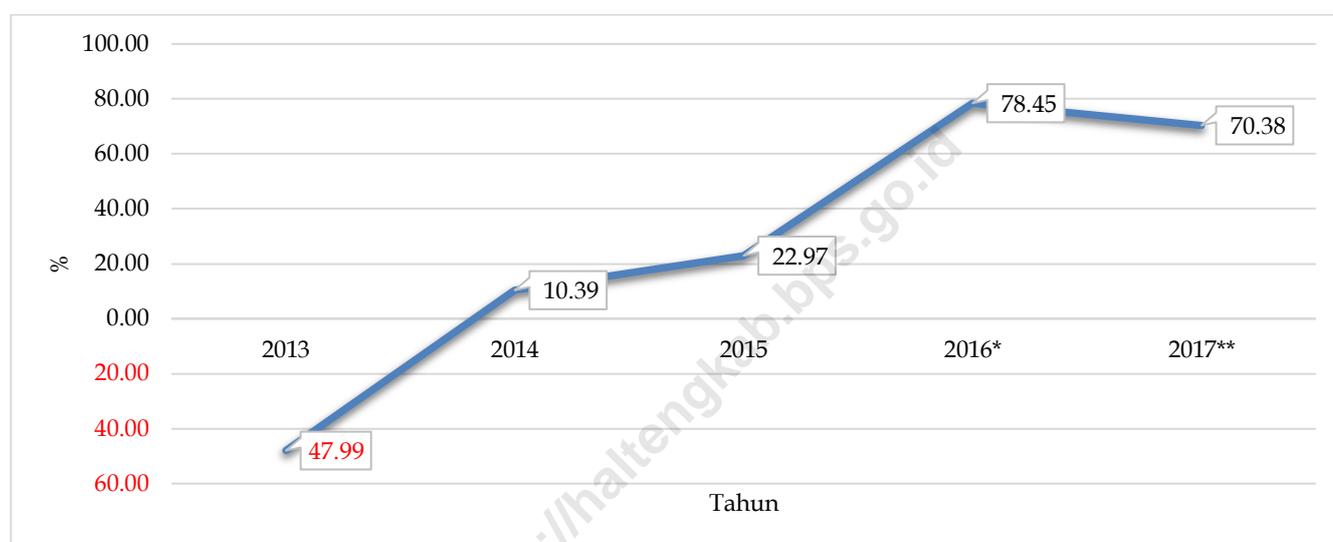
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Tercatat pada 2014 dan tahun 2015, nilai ekspor barang dan jasa mulai perlahan naik meskipun ekspor ke luar negeri dari hasil tambang mentah dari nikel tidak diperbolehkan. Barulah di tahun 2016, hasil tambang nikel mulai di ekspor kembali dikarenakan mulai beroperasinya *smelter*. Kemudian puncaknya setelah dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) No.1 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai larangan ekspor mineral mentah, Ekspor Halteng meningkat pesat yaitu tumbuh sebesar 70,38 persen pada tahun 2017.

3.2.7. Impor Barang dan Jasa

Aktivitas pengeluaran (konsumsi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah) maupun PMTB (termasuk inventori) dan ekspor, didalamnya terkandung produk yang berasal dari impor. PDRB menggambarkan produk yang benar-benar dihasilkan oleh ekonomi domestik Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga untuk mengukur potensi dan besaran produk domestik, maka komponen impor tersebut harus dikeluarkan dari penghitungan yaitu dengan cara mengurangkan nilai PDRB (E) dengan nilai impornya. Hasil pengurangan inilah yang secara konsep harus sama dengan nilai PDRB menurut lapangan usaha (sektor).

Data pada tabel di bawah ini menunjukan bahwa selama periode 2013-2017, nilai impor barang dan jasa Kabupaten Halmahera Tengah cenderung meningkat. Nilai impor barang dan jasa yang tinggi sejatinya terdiri dari impor antara daerah dan impor barang dan jasa dari luar negeri. Meningkatnya impor juga sekaligus mengimbangi ekspor yang tinggi di Halmaher Tengah artinya pada lima tahun terakhir kebutuhan barang dan jasa yang berasal dari luar Halmahera Tengah terus meningkat.

Tabel 15. Perkembangan Impor
Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017
Table 15. Trend of Import, Halmahera Tengah Regency
2013—2017

U r a i a n	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Nilai Impor a. ADHB (Miliar Rp)	558 601,35	812 769,80	1 153 181,63	1 319 014,90	2 466 272,47
b. ADHK 2010 (Miliar Rp)	442 001,18	608 326,69	968 130,84	1 192 793,67	1 901 955,02
Proporsi terhadap PDRB (% - ADHB)	**41,42**	**58,00**	**74,71**	**74,56**	**127,69**
Pertumbuhan[14]	(53,34)	37,63	59,15	23,21	59,45

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

Berbeda dengan komponen ekspor, transaksi impor menjelaskan ada tambahan penyediaan (*supply*) produk di wilayah ekonomi domestik yang berasal dari non residen. Impor terdiri dari produk barang maupun jasa, meskipun rincian penggolongan-nya bisa berbeda dengan ekspor. Komponen impor termasuk pembelian berbagai produk barang dan jasa secara langsung (*direct purchase*) oleh penduduk (*resident*) Kabupaten Halmahera Tengah di luar domestik, baik yang berupa makanan maupun bukan makanan (termasuk jasa).

[14] *Diturunkan dari perhitungan PDRB ADHK 2010*

BAB IV PERKEMBANGAN AGREGAT PDRB PENGELUARAN KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

2013 - 2017

Berbagai indikator ekonomi makro yang lazim digunakan dalam analisis sosial ekonomi dapat diturunkan dari seperangkat data PRDB. Berikut ini akan disjikan beberapa rasio (perbandingan relatif) guna melengkapi analisis, di tengah keterbatasan informasi yang tersedia.

4.1 PDRB (NOMINAL)

Agregat ini menjelaskan nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan di dalam wilayah ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah di mana di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan. PDRB dapat digunakan sebagai ukuran "produktivitas", karena menjelaskan kemampuan wilayah dalam menghasilkan produk domestik, yang dihitung melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu pendekatan nilai tambah, pengeluaran, dan pendapatan.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita

Tabel 16. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017

Table 16. Gross Domestic Regional Bruto and per capita GRDP, Halmahera Tengah Regency 2013—2017

U r a i a n	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Juta Rp) - ADHB	1 348 604,24	1 401 238,93	1 543 496,90	1 768 991,49	1 931 505,12
- ADHK 2010	1 108 318,14	1 087 223,19	1 134 431,04	1 261 991,95	1 337 278,41
PDRB perkapita (Juta Rp) - ADHB	28,65	28,94	30,99	34,47	36,57
ADHK 2010	23,54	22,46	22,78	24,59	25,32
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	2,24	(4,61)	1,42	7,96	2,96
Jumlah penduduk (000 org)	47 079	48 414	49 807	51 315	52 813

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

4.2 PROPORSI PENGELUARAN KONSUMSI AKHIR TERHADAP PDRB

Yang dimaksud dengan konsumsi akhir adalah penggunaan berbagai produk barang dan jasa akhir (baik berasal dari produk domestik maupun impor), untuk menunjang aktivitas ekonomi. Pelaku konsumsi akhir meliputi rumah tangga, LNPRT, dan pemerintah. Walaupun ketiga institusi tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam sistem ekonomi, tetapi sama-sama membelanjakan sebagian pendapatannya untuk tujuan konsumsi akhir.

Tabel 17. Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Tengah 2013-2017

Table 17. Total Proporsion of Final Consumption Expenditure to GRDP Halmahera Tengah Regency 2013—2017

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB) *(Miliar Rp)*					
a. Rumah tangga	463 823,94	522 639,25	603 695,92	644 569,74	694 114,79
b. LNPRT	17 160,17	20 049,62	23 251,99	23 884,61	25 254,20
c. Pemerintah	418 841,65	471 737,36	560 528,70	617 133,65	636 315,30
Jumlah	899 825,76	1 014 426,23	1 187 476,61	1 285 588,00	1 355 684,30
PDRB (ADHB) *(Miliar Rp)*	1 348 604,24	1 401 238,93	1 543 496,90	1 768 991,49	1 931 505,12
Proporsi	66,72	72,39	76,93	72,67	70,19

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

4.3 AVERAGE PROPENSITY TO CONSUME (APC) DAN AVERAGE PROPENSITY TO SAVE (APS)

Indikator ini menjelaskan kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi (*Average Propensity to Consume/APC*) dan keinginan untuk menabung (*Average Propensity to Save/APS*), yang dinyatakan dalam satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan, apabila pendapatan meningkat, tetapi APC menurun, maka APS akan meningkat. Sebaliknya apabila pendapatan meningkat dan APC meningkat, maka APS akan menurun. Rasio yang digunakan merupakan perbandingan nilai antara

bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan.

Nilai APC dan APS dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$APS = \frac{S}{Y_d} \qquad APC = \frac{xC}{Y_d}$$

Di mana C = Tingkat Konsumsi, S = Tingkat Tabungan, dan Y_d = Pendapatan disposabel. Perlu diketahui pula bahwa APC + APS = 1

Tabel 18. Average Propensity to Consume dan Average Propensity to Save Tahun 2013—2017

U r a i a n	2013	2014	2015	2016 *	2017* *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan Disposabel (Y_d) *(Juta Rp)*	1 348 604,24	1 401 238,93	1 543 496,90	1 768 991,49	1 931 505,12
Total Konsumsi RT (ADHB) *(Juta Rp)*	463 823,94	522 639,25	603 695,92	644 569,74	694 114,79
Total Konsumsi LNPRT (ADHB) *(Juta Rp)*	17 160,17	20 049,62	23 251,99	23 884,61	25 254,20
Total Konsumsi Pemerintah (ADHB) *(Juta Rp)*	418 841,65	471 737,36	560 528,70	617 133,65	636 315,30
Total Konsumsi Akhir (ADHB) *(Juta Rp)*	899 825,76	1 014 426,23	1 187 476,61	1 285 588,00	1 355 684,30
APC	**66,72**	**72,39**	**76,93**	**72,67**	**70,19**
Tabungan (Juta Rp)	*448 778,48*	*386 812,70*	*356 020,29*	*483 403,49*	*575 820,82*
APS	**33,28**	**27,61**	**23,07**	**27,33**	**29,81**

*Keterangan : * sementara ** sangat sementara*
Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

4.4 INCREMENTAL CAPITAL OUTPUT RATIO (ICOR)

"ICOR" merupakan parameter ekonomi makro yang menggambarkan rasio investasi kapital/modal terhadap hasil yang diperoleh (*output*) dengan menggunakan investasi tersebut. ICOR juga bisa diartikan sebagai dampak penambahan kapital terhadap penambahan sejumlah output (keluaran).

Kapital diartikan sebagai barang modal fisik yang dibuat oleh manusia dari sumber daya alam, untuk digunakan secara terus menerus dan berulang dalam proses produksi. Sedangkan output adalah besarnya nilai keluaran dari suatu proses ekonomi (produksi) yang dalam hal ini digambarkan melalui parameter "Nilai Tambah".

Dengan menggunakan rasio ini, maka ICOR mampu menjelaskan perbandingan antara penambahan kapital terhadap output atau yang diartikan juga bahwa setiap pertambahan satu unit nilai output (keluaran) akan membutuhkan penambahan kapital sebanyak "K" unit. Formula :

$$ICOR = \frac{\Delta K}{\Delta Y} = \frac{I}{\Delta Y} = \frac{I_t}{Y_t - Y_{t-1}}$$

Di mana: I_t **= PMTB tahun ke t**

Y_t **= Output tahun ke t**

Y_{t-1} **= Output tahun ke t-1**

Tabel 19. ***Incremental Capital Output Ratio*, Kabupaten Halmahera Tengah, Halmahera Tengah Regency 2013-2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016*	2017*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
PDRB (ADHK 2010) (Juta rupiah)	1 108 318,14	1 087 223,19	1 134 431,04	1 261 991,95	1 337 278,41
Perubahan (Juta rupiah)	55 730,86	(21 094,95)	47 207,85	127 560,91	75 286,46
PMTB (ADHK 2010) (Juta Rp)	440 888,34	450 764,56	519 166,78	540 387,65	600 048,12
ICOR	**7,91**	**(21,37)**	**11,00**	**4,24**	**7,97**

Sumber: LK Penghitungan PDRB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran

BAB V PENUTUP

1. PDRB menurut pengeluaran tahun 2013 s.d 2017 dapat menggambarkan perubahan struktur dan perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah pada periode bersangkutan. Analisis ekonomi dari sisi PDRB pengeluaran akan berbeda dengan analisis dari sisi lapangan usaha (industri) yang lebih fokus pada perilaku produksi. Analisis PDRB pengeluaran terfokus pada perilaku penggunaan barang dan jasa akhir, baik untuk tujuan konsumsi akhir, investasi (fisik), maupun perdagangan luar daerah. Empat kelompok sektor atau pelaku ekonomi yang menggunakan barang dan jasa akhir dalam suatu perekonomian adalah rumah tangga, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga/LNPRT, pemerintah, dan perusahaan.
2. Publikasi ini menyajikan analisis sederhana tentang perilaku konsumsi, investasi, dan perdagangan luar negeri dan perdagangan antar daerah yang dimaksud. Analisis didasarkan pada indikator yang diturunkan dari PDRB pengeluaran. Analisis tersebut juga dilengkapi dengan indikator sosial demografi (seperti penduduk, rumah tangga), sehingga hasil analisis yang disajikan menjadi lebih informatif.
3. Data dapat disajikan dalam bentuk series data dari tahun 2013 s.d 2017, sehingga mudah di dalam menggambarkan perubahan atau kecenderungan yang terjadi antara waktu. Masing-masing parameter disajikan dalam satuan yang berbeda (rupiah, indeks, persentase, rasio, unit, dsb) sesuai dengan tujuan analisis dan karakteristik masing-masing data.
4. Data dan indikator yang diturunkan dari sajian data PDRB menurut pengeluaran, dapat dijadikan acuan bagi pengembangan dan perluasan indikator ekonomi makro lain seperti pendapatan disposabel, tabungan, serta model ekonomi sederhana yang saling berkaitan antara seluruh variabel ekonomi dan variabel yang tersedia. Bahkan secara langsung maupun tidak langsung dapat dikaitkan dengan tampilan data ekonomi makro lain seperti PDRB menurut lapangan usaha (industri), Tabel Input-Output, Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dan bahkan Neraca Arus Dana (NAD).
5. Sebagian data tentang interaksi dengan luar daerah (*external account*) secara agregat disajikan di sini, seperti ekspor dan impor. Transaksi eksternal ini menggambarkan seberapa jauh ketergantungan ekonomi Kabupaten Halmahera Tengah terhadap ekonomi luar daerah.

LAMPIRAN

Lampiran 1. PDRB ADHB Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2010-2017 (miliar rupiah)

KOMPONEN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsumsi Rumah Tangga	356,7	393,2	422,7	463,8	522,6	603,7	644,6	694,1
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	11,1	12,4	14,6	17,2	20,0	23,3	23,9	25,3
3. Konsumsi Pemerintah	262,6	324,8	359,1	418,8	471,7	560,5	617,1	636,3
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	288,9	387,6	474,0	503,9	561,8	698,6	736,1	836,0
4.a. Bangunan	159,4	187,2	244,6	253,2	274,5	318,3	342,7	390,0
4.b. Non-Bangunan	129,5	200,5	229,4	250,7	287,3	380,4	393,4	446,0
5. Perubahan Inventori	40,8	51,9	75,1	53,7	(23,7)	130,6	(21,1)	(104,4)
6. Ekspor	749,0	662,8	594,8	449,8	661,4	679,9	1 087,4	2 310,5
7. Impor	756,9	755,2	728,4	558,6	812,8	1 153,2	1 319,0	2 466,3
PDRB	952,2	1 077,4	1 211,8	1 348,6	1 401,2	1 543,5	1 769,0	1 931,5

Lampiran 2. PDRB ADHK Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran 2010-2017 (miliar rupiah)

KOMPONEN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsumsi Rumah Tangga	356,7	372,4	389,1	402,8	433,0	476,0	491,3	508,8
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	11,1	11,8	12,8	14,0	15,6	17,1	17,3	17,7
3. Konsumsi Pemerintah	262,6	296,7	319,5	343,9	352,9	390,2	401,1	407,1
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	288,9	364,1	416,7	440,9	450,8	519,2	540,4	600,0
4.a. Bangunan	159,4	179,9	203,1	210,7	212,9	229,2	245,0	277,0
4.b. Non-Bangunan	129,5	184,2	213,7	230,1	237,8	290,0	295,4	323,0
5. Perubahan Inventori	40,8	45,5	53,9	(71,6)	(20,7)	129,6	(13,3)	(28,9)
6. Ekspor	749,0	798,9	808,0	420,3	463,9	570,5	1 018,0	1 734,5
7. Impor	756,9	887,2	947,3	442,0	608,3	968,1	1 192,8	1 902,0
PDRB	**952,2**	**1 002,3**	**1 052,6**	**1 108,3**	**1 087,2**	**1 134,4**	**1 262,0**	**1 337,3**

Lampiran 3. Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Persen)

KOMPONEN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsumsi Rumah Tangga	**37,46**	**36,49**	**34,88**	**34,39**	**37,30**	**39,11**	**36,44**	**35,94**
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	**1,16**	**1,15**	**1,20**	**1,27**	**1,43**	**1,51**	**1,35**	**1,31**
3. Konsumsi Pemerintah	**27,57**	**30,15**	**29,64**	**31,06**	**33,67**	**36,32**	**34,89**	**32,94**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	**30,34**	**35,98**	**39,11**	**37,36**	**40,10**	**45,26**	**41,61**	**43,28**
4.a. Bangunan	**16,74**	**17,37**	**20,18**	**18,78**	**19,59**	**20,62**	**19,37**	**20,19**
4.b. Non-Bangunan	**13,61**	**18,61**	**18,93**	**18,59**	**20,51**	**24,64**	**22,24**	**23,09**
5. Perubahan Inventori	**4,28**	**4,81**	**6,19**	**3,98**	**(1,69)**	**8,46**	**(1,19)**	**(5,41)**
6. Ekspor	**78,66**	**61,51**	**49,09**	**33,35**	**47,20**	**44,05**	**61,47**	**119,62**
7. Impor	**79,49**	**70,09**	**60,11**	**41,42**	**58,00**	**74,71**	**74,56**	**127,69**
PDRB	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Lampiran 4. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Pengeluaran (Persen)

KOMPONEN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsumsi Rumah Tangga	**4,40**	**4,47**	**3,51**	**7,50**	**9,95**	**3,20**	**3,56**
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	**6,73**	**7,99**	**10,10**	**11,42**	**9,00**	**1,55**	**2,29**
3. Konsumsi Pemerintah	**13,00**	**7,68**	**7,66**	**2,61**	**10,57**	**2,79**	**1,50**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	**26,01**	**14,46**	**5,80**	**2,24**	**15,17**	**4,09**	**11,04**
4.a. Bangunan	**12,86**	**12,89**	**3,78**	**1,03**	**7,64**	**6,91**	**13,06**
4.b. Non-Bangunan	**42,18**	**16,00**	**7,71**	**3,35**	**21,92**	**1,85**	**9,37**
5. Perubahan Inventori	**11,63**	**18,30**	**(232,85)**	**71,14**	**727,60**	**(110,29)**	**(117,04)**
6. Ekspor	**6,66**	**1,13**	**(47,99)**	**10,39**	**22,97**	**78,45**	**70,38**
7. Impor	**17,21**	**6,77**	**(53,34)**	**37,63**	**59,15**	**23,21**	**59,45**
PDRB	**5,26**	**5,02**	**5,29**	**(1,90)**	**4,34**	**11,24**	**5,97**

Lampiran 5. Indeks Implisit Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2017

KOMPONEN	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. Konsumsi Rumah Tangga	**100,00**	**105,56**	**108,63**	**115,16**	**120,71**	**126,82**	**131,20**	**136,43**
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	**100,00**	**104,74**	**114,10**	**122,21**	**128,16**	**136,36**	**137,93**	**142,57**
3. Konsumsi Pemerintah	**100,00**	**109,48**	**112,42**	**121,78**	**133,66**	**143,64**	**153,85**	**156,29**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	**100,00**	**106,47**	**113,74**	**114,29**	**124,64**	**134,57**	**136,22**	**139,33**
4.a. Bangunan	**100,00**	**104,05**	**120,45**	**120,17**	**128,93**	**138,87**	**139,86**	**140,77**
4.b. Non-Bangunan	**100,00**	**108,83**	**107,36**	**108,91**	**120,80**	**131,17**	**133,20**	**138,09**
5. Perubahan Inventori	**100,00**	**113,91**	**139,34**	**(75,05)**	**114,76**	**100,79**	**157,92**	**360,63**
6. Ekspor	**100,00**	**82,96**	**73,62**	**107,03**	**142,58**	**119,19**	**106,81**	**133,21**
7. Impor	**100,00**	**85,12**	**76,89**	**126,38**	**133,61**	**119,11**	**110,58**	**129,67**
PDRB	**100,00**	**107,50**	**115,13**	**121,68**	**128,88**	**136,06**	**140,17**	**144,44**

Lampiran 6. **Laju Pertumbuhan Implisit Kabupaten Halmahera Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2011-2017**

KOMPONEN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Konsumsi Rumah Tangga	**5,56**	**2,90**	**6,01**	**4,82**	**5,06**	**3,46**	**3,98**
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	**4,74**	**8,94**	**7,11**	**4,86**	**6,40**	**1,15**	**3,37**
3. Konsumsi Pemerintah	**9,48**	**2,69**	**8,32**	**9,76**	**7,46**	**7,11**	**1,59**
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (4.a. + 4.b.)	**6,47**	**6,83**	**0,49**	**9,06**	**7,97**	**1,22**	**2,28**
4.a. Bangunan	**4,05**	**15,76**	**(0,23)**	**7,29**	**7,71**	**0,71**	**0,65**
4.b. Non-Bangunan	**8,83**	**(1,35)**	**1,45**	**10,92**	**8,58**	**1,55**	**3,67**
5. Perubahan Inventori	**13,91**	**22,33**	**(153,86)**	**252,92**	**(12,18)**	**56,68**	**128,36**
6. Ekspor	**(17,04)**	**(11,25)**	**45,37**	**33,22**	**(16,41)**	**(10,38)**	**24,71**
7. Impor	**(14,88)**	**(9,67)**	**64,36**	**5,72**	**(10,85)**	**(7,16)**	**17,26**
PDRB	**7,50**	**7,10**	**5,69**	**5,92**	**5,57**	**3,02**	**3,04**

DATA

MENCERDASKAN BANGSA